



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PROGRAM
GASING FASE SATU, DUA DAN TIGA DI PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program GASING Fase satu, dua dan tiga di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Tim Pelaksana dan Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim Pelaksana dan Sekretariat Program GASING Fase satu, dua dan tiga di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

11. Peraturan Pemerintah...../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Program Gasing Fase satu, dua dan tiga di Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana dan Sekretariat Program Gasing Fase satu, dua dan tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
Mengarahkan Tim Pelaksana dan Sekretariat untuk melaksanakan tugasnya.
 2. Penanggungjawab
Bertanggungjawab mengawasi jalannya Kegiatan Gasing Fase satu, dua dan tiga.
 3. Ketua
Mengoordinasikan dan memimpin Pelaksanaan Kegiatan Gasing Fase satu, dua dan tiga.
 4. Wakil Ketua
Mewakili dan membantu tugas kerja dari Ketua Tim dalam Pelaksanaan Kegiatan Gasing Fase satu, dua dan tiga.

5. Sekretaris...../4

5. Sekretaris

Menyusun dan menyiapkan Perlengkapan dan Administrasi Tim Pelaksana dan Sekretariat Kegiatan Gasing Fase satu, dua dan tiga.

6. Anggota

Membantu tugas pimpinan dalam menyiapkan, melaksanakan, evaluasi serta pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Gasing Fase satu, dua dan tiga.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN
SEKRETARIAT PROGRAM GASING FASE
SATU, DUA DAN TIGA DI PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
PROGRAM FASE SATU

A. KABUPATEN DOGIYAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	BERNARD DOUW, S.Pd., M.Pd	KETUA
4	PHILIPUS SESA, S.Pd	WAKIL KETUA
5	COSTANTINA A. MOROMON, S.Sos	SEKRETARIS
6	LUKAS PIGOME, S.Pd	ANGGOTA
7	ALEX PIGAI, S.Th	ANGGOTA
8	YOHANES PEKEY, SE	ANGGOTA
9	JUMARDI	ANGGOTA
10	DAVID GOO, S.Pd	ANGGOTA
11	GERALDUS WAINE, S.Pd	ANGGOTA
12	ENEAS ANOU, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
13	STEVANUS IYAI	ANGGOTA
14	EMANNUEL MAGAI, S.Pd	ANGGOTA
15	BENEDIKTUS GOO, S.Pd	ANGGOTA

B. KABUPATEN INTAN JAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	DAVID AGUSTA, ST	KETUA
4	ILANI EKA TAKIMAI, SE	WAKIL KETUA
5	ARIF ARTONO, S.Sos	SEKRETARIS
6	THOMAS ZONGGONAU, S.IP	ANGGOTA
7	CINTIKE YULIANA RUMPOMBO, S.Pd	ANGGOTA
8	PRIYA SAPTONO HADI, S.STP	ANGGOTA
9	ROSSALINA IMELDA	ANGGOTA
10	OSTINA WAIBUSI, S.Si., M.Gs	ANGGOTA
11	ISHAK BARA'SA'TI, M.Pd	ANGGOTA
12	OKTOVIANUS MALATUNI, S.Pd	ANGGOTA
13	NATAN SENTOSA, ST	ANGGOTA
14	HENGKI BAGAU, S.Pd	ANGGOTA
15	RUT KAPITAUW, S.Pd	ANGGOTA

C. KABUPATEN PUNCAK...../2

C. KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	DINA IGA AYONDA, S.IP, MA, MSD	KETUA
4	IMANUEL MANGGO, S.IP	WAKIL KETUA
5	SAMUEL EFRAIM ALUY, S.STP	SEKRETARIS
6	ISAK WAKERKWA	ANGGOTA
7	YOHANES PEKEY, SE	ANGGOTA
8	DAVID WORUMBOY, S.Pd	ANGGOTA
9	EXEL DOMINIC LANTEMONA	ANGGOTA
10	AGUSTINA SAMORI, S.Pak	ANGGOTA
11	ALPON NEWEGALEN, S.PAK	ANGGOTA
12	MANTRUK KOGOYA	ANGGOTA
13	YOSUA WALES	ANGGOTA
14	AMUS WAKER, A.Ma.Pd	ANGGOTA
15	MARKUS NGUTRA, S.Pd	ANGGOTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
PROGRAM FASE DUA

A. KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	MARTEN UKAGO, SE., M.Si	KETUA
4	FREDI M. EDOWAI, SE., MDP	WAKIL KETUA
5	TINO TARIBABA, S.Sos., M.AP	SEKRETARIS
6	TRIKO DATUMUSA, S.Pd	ANGGOTA
7	RUTRETINA SINAGA, S.Pd	ANGGOTA
8	YETI TRIANA S.Sos	ANGGOTA
9	NASIR, SE	ANGGOTA
10	EBIT RUSALI, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
11	RENI YANTI SINAGA	ANGGOTA
12	DRA. DINA PIDJER	ANGGOTA
13	ALBER SIPAELU	ANGGOTA
14	SIMON HENDRIK RUMASEB, S.Pd	ANGGOTA
15	HELENA HOBERA	ANGGOTA

B. KABUPATEN PANIAI...../3

B. KABUPATEN PANIAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	DENI TENOUYE, S.Pak., M.Th	KETUA
4	THOMAS SONGGONAU, SE	WAKIL KETUA
5	NELIUS TATOGO, S.Kom	SEKRETARIS
6	PIETH H. NAWIPA, S.Pd	ANGGOTA
7	NIUS ADII, S.Pd	ANGGOTA
8	ERNI TONAPA, SE	ANGGOTA
9	ALPIUS KAYAME, S.PT	ANGGOTA
10	ROBERT KAYAME	ANGGOTA
11	FRANS YANI GAMURI, S.Pd	ANGGOTA
12	YEKO GOBAI, S.TP	ANGGOTA
13	AYUB NAWIPA, S.I	ANGGOTA
14	SELVINA YOGI, Amd. Pd	ANGGOTA
15	DORSILA DEGEI, S.Th	ANGGOTA

C. KABUPATEN DEIYAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNGJAWAB
3	NOTOVIA PAKAGE, S.Pd., M.Si	KETUA
4	SERFINA DOUW, S.Pd	WAKIL KETUA
5	AGUSTINUS PEKEY, S.Pd	SEKRETARIS
6	YULIASMIN TECUARI, S.Si	ANGGOTA
7	DOMINIKUS ADII, S.Th., S.PAK	ANGGOTA
8	YULIANUS PEKEI, S.IP	ANGGOTA
9	SAMUEL EFRAIM ALUY, S.STP	ANGGOTA
10	ELCO GOBAI	ANGGOTA
11	Drs. MARTEN TANDIRERUNG	ANGGOTA
12	SIMON BADII, S.Pd	ANGGOTA
13	WILEM PEKEI	ANGGOTA
14	YUSAK ADII, S.Pak	ANGGOTA
15	ABDUL HAMID, S.Pd	ANGGOTA

D. KABUPATEN DEIYAI...../4

D. KABUPATEN DEIYAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNGJAWAB
3	NOTOVIA PAKAGE, S.Pd., M.Si	KETUA
4	SERFINA DOUW, S.Pd	WAKIL KETUA
5	AGUSTINUS PEKEY, S.Pd	SEKRETARIS
6	YULIASMIN TECUARI, S.Si	ANGGOTA
7	DOMINIKUS ADII, S.Th., S.PAK	ANGGOTA
8	YULIANUS PEKEI, S.IP	ANGGOTA
9	SAMUEL EFRAIM ALUY, S.STP	ANGGOTA
10	ELCO GOBAI	ANGGOTA
11	Drs. MARTEN TANDIRERUNG	ANGGOTA
12	SIMON BADI, S.Pd	ANGGOTA
13	WILEM PEKEI	ANGGOTA
14	YUSAK ADII, S.Pak	ANGGOTA
15	ABDUL HAMID, S.Pd	ANGGOTA

E. KABUPATEN DOGIYAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	PHILIPUS SESA, S.Pd	KETUA
4	BERNARD DOUW, S.Pd., M.Pd	WAKIL KETUA
5	ALEX PIGAI, S.Th	SEKRETARIS
6	LUKAS PIGOME, S.Pd	ANGGOTA
7	MUH TOHIR, S.Pd	ANGGOTA
8	AGUSTINUS KADEPA, ST	ANGGOTA
9	NUR'AIN HULINGGI	ANGGOTA
10	DAVID GOO, S.Pd	ANGGOTA
11	GERALDUS WAINE, S.Pd	ANGGOTA
12	ENEAS ANOU, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
13	STEVANUS IYAI	ANGGOTA
14	EMANNUEL MAGAI, S.Pd	ANGGOTA
15	BENEDIKTUS GOO, S.Pd	ANGGOTA

F. KABUPATEN PUNCAK JAYA...../5

F. KABUPATEN PUNCAK JAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	AGUSTINA SAMORI, S.Pak	KETUA
4	DAVID WORUMBOY, S.Pd	WAKIL KETUA
5	IMANUEL MANGGO, S.IP	SEKRETARIS
6	TINO TARIBABA, S.Sos., M.AP	ANGGOTA
7	CONSTANTINA A. MOROMON, S.Sos	ANGGOTA
8	AMAN KOGOYA, S.Pd	ANGGOTA
9	ARIE INDRAWAN TANJUNG	ANGGOTA
10	NAGALO MARANO	ANGGOTA
11	KARUNIA PAREWANG	ANGGOTA
12	AGUSTINUS YUSUP SATU	ANGGOTA
13	MARWANTO	ANGGOTA
14	SURYANTI RANTE SALAMBA	ANGGOTA
15	ESRA RANTE SALAMBA, S.Pd	ANGGOTA

G. KABUPATEN PUNCAK

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	DINA IGA AYONDA, S.IP, MA, MSD	KETUA
4	AGUSTINA SAMORI, S.Pak	WAKIL KETUA
5	SAMUEL EFRAIM ALUY, S.STP	SEKRETARIS
6	DAVID WORUMBOY, S.Pd	ANGGOTA
7	AGUSTINUS KADEPA, ST	ANGGOTA
8	YOHANES ANDI BASTEYS TOAM	ANGGOTA
9	EXEL DOMINIC LANTEMONA	ANGGOTA
10	IMANUEL MANGGO, S.IP	ANGGOTA
11	ALPON NEWEGALEN, S.PAK	ANGGOTA
12	MANTRUK KOGOYA	ANGGOTA
13	YOSUA WALES	ANGGOTA
14	AMUS WAKER, A.Ma.Pd	ANGGOTA
15	MARKUS NGUTRA, S.Pd	ANGGOTA

H. KABUPATEN INTAN JAYA...../6

H. KABUPATEN INTAN JAYA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	MARTEN UKAGO, SE., M.Si	KETUA
4	THOMAS SONGGONAU, SE	WAKIL KETUA
5	DAVID AGUSTA, ST	SEKRETARIS
6	ARIF ARTONO, S.Sos	ANGGOTA
7	CINTIKE YULIANA RUMPOMBO, S.Pd	ANGGOTA
8	ILANI EKA TAKIMAI, SE	ANGGOTA
9	RUTRETINA SINAGA, S.Pd	ANGGOTA
10	JAMES PAONGANAN	ANGGOTA
11	ISHAK BARA'SA'TI, M.Pd	ANGGOTA
12	OKTOVIANUS MALATUNI, S.Pd	ANGGOTA
13	NATAN SENTOSA, ST	ANGGOTA
14	HENGKI BAGAU, S.Pd	ANGGOTA
15	RUT KAPITAUW, S.Pd	ANGGOTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT
PROGRAM FASE TIGA

A. KABUPATEN NABIRE

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	NASIR, SE	KETUA
4	RENI YANTI SINAGA	WAKIL KETUA
5	EBIT RUSALI, S.Pd., M.Pd	SEKRETARIS
6	YETI TRIANA S.Sos	ANGGOTA
7	CONSTANTINA A. MOROMON, S.Sos	ANGGOTA
8	YULIASMIN TECUARI, S.Si	ANGGOTA
9	YOHANES ANDI BASTEYS TOAM	ANGGOTA
10	MUHAMMAD NUR HIDAYAT, S.Hi	ANGGOTA
11	REYNO RENALD GOBAY	ANGGOTA
12	DRA. DINA PIDJER	ANGGOTA
13	ALBER SIPAELU	ANGGOTA
14	RIBKA DAUNDI	ANGGOTA
15	HELENA HOBERA	ANGGOTA

B. KABUPATEN MIMIKA...../7

B. KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	ZETH SONI AWOM, S.E	KETUA
4	YOHANIS TUMUNGLO, S.Pd	WAKIL KETUA
5	ALESINA YOGI, S.Pd	SEKRETARIS
6	ENY MANGALO, SE., M.AP	ANGGOTA
7	AMAN KOGOYA, S.Pd	ANGGOTA
8	ALFRIDA I. LOBORAN, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
9	PRIYA SAPTONO HADI, S.STP	ANGGOTA
10	DINA USIOR, SE., M.Ak	ANGGOTA
11	YANUARIUS KAYAME, SH	ANGGOTA
12	ALFREDO BARANSANO, A.Md	ANGGOTA
13	ONESIMUS KAMO	ANGGOTA
14	IGNASIUS VALUK	ANGGOTA
15	BAGUS RAHMAN, SE	ANGGOTA

C. KABUPATEN PANIAI

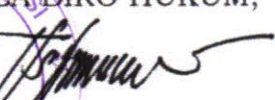
NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNG JAWAB
3	PIETH H. NAWIPA, S.Pd	KETUA
4	NELIUS TATOGO, S.Kom	WAKIL KETUA
5	DENI TENOUYE, S.Pak., M.Th	SEKRETARIS
6	ALFRIDA I. LOBORAN, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA
7	SURATMAN	ANGGOTA
8	NURMANI, S.Pd	ANGGOTA
9	PILIPUS KAYAME, S.Kom	ANGGOTA
10	KAROLUS P. BARUNG	ANGGOTA
11	FRANS YANI GAMURI, S.Pd	ANGGOTA
12	YEKO GOBAI, S.TP	ANGGOTA
13	AYUB NAWIPA, S.I	ANGGOTA
14	SELVINA YOGI, Amd. Pd	ANGGOTA
15	DORSILA DEGEI, S.Th	ANGGOTA

D. KABUPATEN DEIYAI...../8

D. KABUPATEN DEIYAI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., MM	PENGARAH
2	ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M	PENANGGUNGJAWAB
3	FREDI M. EDOWAI, SE., MDP	KETUA
4	NOTOVIA PAKAGE, S.Pd., M.Si	WAKIL KETUA
5	AGUSTINUS PEKEY, S.Pd	SEKRETARIS
6	SERFINA DOUW, S.Pd	ANGGOTA
7	DOMINIKUS ADII, S.Th., S.PAK	ANGGOTA
8	YOHANES PIGAI	ANGGOTA
9	YOHANES ANDI BASTEYS TOAM	ANGGOTA
10	YOHANES PEKEI	ANGGOTA
11	Drs. MARTEN TANDIRERUNG	ANGGOTA
12	SIMON BADII, S.Pd	ANGGOTA
13	WILEM PEKEI	ANGGOTA
14	ABDUL HAMID, S.Pd	ANGGOTA
15	YUSAK ADII, S.Pak	ANGGOTA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002